

Eksplotasi Kolonial Prancis di Jawa: Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib sebagai Bentuk Pemiskinan Sistematis (1808-1811)

Siti Khadijah¹ Juliani Sihombing² Rosmaida Sinaga³ Mutiara Hidayah⁴ Rahmi Asyifa Hidayah Sembiring⁵ Alya Fakhri⁶ Selvia Andriani Putri Damanik⁷ Ririn Ivanka⁸ Ronald Gemsar Simbolon⁹

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: 05sitikhadijahhh@gmail.com¹ julianisihombing6@gmail.com² rosmaidasinaga@unimed.ac.id³ mutiaimutt22@gmail.com⁴ asshifahidayah07@gmail.com⁵ alyafakhri3122@gmail.com⁶ selviaputridamanik02@gmail.com⁷ brmanurungririnivanka@gmail.com⁸ ronalsimbolon318@gmail.com⁹

Abstract

This study analyzes the Contingent System and the Forced Delivery System implemented by Herman Willem Daendels during his administration in Java (1808-1811). It argues that these policies were not merely fiscal instruments but were tools for the systematic impoverishment of the Javanese people. These policies were a product of European geopolitical conflict, where Java was transformed into a French defensive fortress against the British threat. Using historical research methods, this study finds that Daendels enforced a dual system of exploitation: the Contingent System seized the people's staple food, while the Forced Delivery System compelled farmers to sell export commodities at low prices. To execute this system, Daendels co-opted the local regents (Bupatis), turning them into agents of the colonial government through strict quotas and the threat of sanctions. The consequences for the Javanese people were severe, including wealth drainage, a double burden (surrendering produce and performing forced labor/ kerja rodi), and widespread famine. All profits from this system were channeled to fund French military ambitions, with no regard for the welfare of the Javanese. In conclusion, Daendels' rule marked a transition towards a highly centralized and exploitative colonial state.

Keywords: Herman Willem Daendels, Contingent System, Forced Delivery System, Systematic Impoverishment, Colonial Java, French Interests, Economic Exploitation

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib yang diterapkan oleh Herman Willem Daendels selama masa pemerintahannya di Jawa (1808-1811). Penelitian ini berargumen bahwa kedua kebijakan tersebut bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan instrumen pemiskinan sistematis terhadap rakyat Jawa. Kebijakan ini lahir dari konflik geopolitik Eropa, di mana Jawa dijadikan benteng pertahanan Prancis untuk menghadapi ancaman Inggris. Melalui metode penelitian sejarah, penelitian ini menemukan bahwa Daendels memberlakukan sistem eksploitasi ganda: Sistem Kontingen merampas hasil pangan pokok rakyat, sementara Sistem Penyerahan Wajib memaksa petani menjual komoditas ekspor dengan harga murah. Untuk meluncurkan sistem ini, Daendels mengubah para bupati menjadi alat pemerintah kolonial dengan memberikan target ketat dan ancaman sanksi. Dampaknya, rakyat Jawa mengalami pengurasan kekayaan, beban ganda (menyerahkan hasil bumi dan tenaga untuk kerja rodi), serta krisis kelaparan. Seluruh keuntungan dari sistem ini dialirkan untuk membiayai ambisi militer Prancis, tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat Jawa. Simpulannya, pemerintahan Daendels menandai peralihan menuju negara kolonial yang terpusat dan sangat eksploitatif.

Kata Kunci: Herman Willem Daendels, Sistem Kontingen, Sistem Penyerahan Wajib, Pemiskinan Sistematis, Jawa Kolonial, Kepentingan Prancis, Eksploitasi Ekonomi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Periode pendek pemerintahan Herman Willem Daendels di Hindia Belanda (1808-1811) tidak dapat dipisahkan dari gelombang besar Revolusi Prancis dan ambisi imperial Napoleon Bonaparte yang mengguncang Eropa. Pada tahun 1806, Napoleon mendirikan Kerajaan Belanda yang baru dan menunjuk saudaranya, Louis Napoleon, sebagai rajanya. Langkah ini efektif menjadikan Belanda sebagai negara boneka (dikenal sebagai *Koninkrijk Holland*) di bawah kendali Prancis (Ward, 2009). Sebagai konsekuensinya, seluruh wilayah kekuasaan Belanda, termasuk koloninya yang berharga di Asia Tenggara, yaitu Hindia Belanda, otomatis jatuh ke dalam pengaruh dan kepentingan Prancis. Situasi ini menciptakan ancaman eksistensial bagi Hindia Belanda. Saat itu, Inggris, sebagai musuh bebuyutan Napoleon, menguasai lautan. Pulau Jawa, jantung ekonomi Hindia Belanda, menjadi sangat rentan terhadap invasi Inggris yang dapat terjadi kapan saja. VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang sebelumnya menguasai wilayah itu telah bangkrut dan dibubarkan pada 1799, meninggalkan pemerintahan kolonial yang lemah dan tidak efisien (Ricklefs, 2008). Napoleon membutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan tegas untuk membenahi keadaan, memperkuat pertahanan Jawa dari serangan Inggris, dan yang terpenting, memastikan koloni ini tetap dapat menghasilkan pendapatan untuk mendanai perangnya di Eropa.

Dalam konteks inilah Herman Willem Daendels, seorang Belanda yang berpandangan revolusioner dan setia kepada Prancis, dipilih. Dia diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Tugasnya sangat jelas dan berat: mentransformasi Jawa menjadi sebuah benteng yang tangguh dan mesin ekonomi yang efisien untuk kepentingan Imperium Prancis (Bosma & Raben, 2008). Daendels tiba dengan kekuasaan penuh (*gubernur jenderal dengan kuasa istimewa*) yang hampir-hampir bersifat diktator, mencerminkan urgensi dari tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian, masa pemerintahan Daendels adalah produk langsung dari pergeseran geopolitik global. Kebijakan-kebijakan kerasnya, termasuk yang akan dibahas dalam penelitian ini, pada dasarnya adalah implementasi dari mandat Prancis untuk menyelamatkan dan mengeksploitasi Jawa di tengah turbulensi Perang Napoleon. Periode ini menandai babak baru dalam penjajahan di Nusantara, dari model kongsi dagang VOC yang korup menuju model negara kolonial yang terpusat, militeristik, dan eksploitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan kritis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang berarti penelitian ini berfokus pada memahami makna dan konteks di balik kebijakan Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib, bukan pada pengukuran angka-angka statistik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu dengan menelusuri dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber data terdiri dari dua jenis. Pertama, sumber primer seperti laporan resmi pemerintah kolonial zaman Daendels, arsip-arsip surat menyurat, dan dokumen kontemporer lainnya yang berasal dari periode 1808-1811. Kedua, sumber sekunder yang berupa buku-buku sejarah, jurnal akademis, dan artikel ilmiah yang ditulis oleh para sejarawan kemudian, yang menganalisis periode tersebut. Semua sumber dipilih secara ketat dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis dan institusinya. Proses analisis data dilakukan secara kritis dengan mengikuti langkah-langkah penelitian sejarah. Dimulai dengan heuristik, yaitu tahap pengumpulan semua sumber data yang relevan. Selanjutnya, dilakukan kritik sumber, baik eksternal untuk memastikan keaslian dokumen maupun internal untuk menilai ketersediaan dan bias yang mungkin ada dalam sumber. Setelah sumber diverifikasi, tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data-data yang telah terkumpul untuk mencari hubungan sebab-akibat dan pola-pola yang menjawab

rumusan masalah. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan semua temuan ke dalam narasi sejarah yang koheren dan objektif, sehingga dapat menjelaskan bagaimana kedua kebijakan tersebut berfungsi sebagai alat pemiskinan sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian 1: Konteks Kekuasaan Kolonial Prancis di Jawa

Ketika Herman Willem Daendels tiba di Jawa pada tahun 1808, ia mewarisi situasi yang sangat sulit. Kas pemerintah kolonial praktis kosong akibat kebangkrutan VOC dan blokade laut Inggris yang memutus jalur perdagangan internasional. Namun, Daendels justru mendapat tugas berat dari Prancis: mengubah Jawa menjadi benteng pertahanan yang mampu menahan invasi Inggris. Untuk membiayai ambisi militer ini seperti membangun jalan raya pos, benteng, dan pasukan tentara Daendels membutuhkan dana yang sangat besar dalam waktu singkat. Menurut sejarawan M.C. Ricklefs (2008), Daendels adalah figur yang tegas dan tanpa kompromi, ditunjuk tepat karena reputasinya sebagai administrator yang efektif. Ia tiba dengan "kekuasaan luar biasa" untuk mengambil langkah-langkah drastis. Situasi ini memaksanya untuk menciptakan sistem pemasukan negara yang cepat dan langsung. Sumber daya Jawa - khususnya tenaga kerja dan hasil bumi dilihat sebagai aset yang harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan. Seperti dikemukakan oleh Peter Boomgaard (1989), kebijakan Daendels didorong oleh "kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan sumber daya" dalam situasi perang, yang membuatnya tidak punya pilihan selain menerapkan sistem yang eksploitatif. Dengan kata lain, tekanan untuk membiayai pertahanan kolonial inilah yang menjadi akar dari kebijakan ekonomi kerasnya, termasuk Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib yang akan dibahas berikutnya.

Kondisi sulit yang diwarisi Daendels bukan hanya sekadar kas negara yang kosong, tetapi juga sistem pemerintahan yang bangkrut secara struktural. Kebangkrutan dan pembubaran VOC pada 1799 meninggalkan vacuum of power (kekosongan kekuasaan) dan administrasi yang sangat korup. Sejarawan Bosma dan Raben (2008) dalam *"Being 'Dutch' in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500-1920"* menjelaskan bahwa VOC gagal karena tidak mampu mengelola wilayah jajahannya sebagai sebuah negara yang terintegrasi, dan hanya fokus pada penumpukan keuntungan jangka pendek. "Warisan VOC bagi pemerintah kolonial baru adalah birokrasi yang kacau, hutang menumpuk, dan hubungan dengan penguasa lokal yang tidak stabil" (Bosma & Raben, 2008, hlm. 154). Ditambah dengan blokade Inggris yang efektif, seperti yang dijelaskan Ricklefs, perekonomian Jawa yang bergantung pada ekspor menjadi lumpuh total, memutus sumber pendapatan tradisional dan memaksa Daendels mencari cara baru yang radikal untuk mengisi kas negara. Tugas berat dari Prancis untuk mengubah Jawa menjadi "benteng pertahanan" harus dipahami sebagai bagian dari strategi global Napoleon Bonaparte. Sejarawan Owen Connelly (2006) dalam *"The Wars of the French Revolution and Napoleon, 1792-1815"* menegaskan bahwa seluruh kebijakan luar negeri Napoleon ditujukan untuk melumpuhkan Inggris, termasuk dengan mengamankan semua wilayah yang bisa menghasilkan sumber daya untuk mendanai perang. "Koloni-koloni seperti Hindia Belanda dilihat sebagai 'sapi perah' yang vital; mereka harus mampu membiayai diri sendiri dan jika mungkin, menyumbang pada kas Perancis" (Connelly, 2006, hlm. 189). Dalam konteks inilah "kekuasaan luar biasa" yang diberikan kepada Daendels menjadi masuk akal. Ia bukan diutus untuk berkompromi atau berdiplomasi, melainkan untuk bertindak cepat dan keras. Kekuasaannya yang hampir diktator, seperti disebutkan Ricklefs, adalah sebuah instrumen untuk mengeksekusi mandat Napoleon tanpa halangan dari prosedur birokrasi yang lama.

Dengan blokade yang memutus pendapatan eksternal dan kas negara yang kosong, sumber daya alam dan manusia Jawa menjadi satu-satunya "mesin uang" yang dapat diakses

Daendels dengan cepat. Tekanan waktu dari ancaman invasi Inggris yang nyata menciptakan situasi darurat yang, dalam perspektif Daendels, membenarkan segala cara. Sejarawan Ulbe Bosma (2021) dalam *"The Making of a Periphery: How Island Southeast Asia Became a Mass Exporter of Tropical Commodities"* berargumen bahwa masa Daendels menandai titik balik menuju sistem ekonomi ekstraktif yang terpusat. "Di bawah tekanan fiskal dan militer yang ekstrem, Daendels memilih untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya yang sudah ada, bukannya membangun sistem ekonomi baru yang berkelanjutan" (Bosma, 2021, hlm. 73). Oleh karena itu, "kebutuhan mendesak" yang dikutip dari Boomgaard itu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang melihat tenaga kerja dan hasil bumi rakyat Jawa bukan sebagai aset untuk dikembangkan, melainkan sebagai cadangan yang harus segera dikuras untuk menyelamatkan pemerintahan kolonial dari kehancuran.

Bagian 2: Mekanisme Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib serta Peran Bupati

Daendels menerapkan dua kebijakan ekonomi yang saling terkait untuk menguras kekayaan Jawa secara sistematis. Sistem Kontingen mewajibkan setiap daerah menyerahkan sebagian hasil bumi sebagai pajak dalam bentuk barang kepada pemerintah kolonial. Setiap kabupaten harus memberikan komoditas seperti beras, jagung, atau ternak dalam jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan perkiraan produksi daerahnya. Namun, seperti dicatat oleh Ricklefs (2008), penetapan jumlah ini seringkali tidak realistis dan tidak mempertimbangkan kondisi nyata petani, termasuk kemungkinan gagal panen. Sementara itu, Sistem Penyerahan Wajib berfokus pada komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan nila. Rakyat dipaksa menjual hasil bumi mereka kepada pemerintah dengan harga yang sangat murah, biasanya hanya 40-60% dari harga pasar yang wajar (Boomgaard, 1989). Kebijakan ini membuat petani mengalami kerugian ganda: kehilangan hasil panen sekaligus kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka peroleh. Dalam menjalankan kedua sistem ini, Daendels memanfaatkan para Bupati sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. Setiap bupati diberi target yang harus dipenuhi dan bertanggung jawab penuh atas pengumpulan hasil bumi dari rakyat di wilayahnya. Menurut Carey (2007), Daendels menerapkan disiplin ketat terhadap para bupati, dimana yang gagal memenuhi kuota akan menghadapi sanksi berat termasuk pemberhentian dari jabatan. Tekanan ini memaksa para bupati mengambil tindakan keras terhadap rakyatnya sendiri, seperti memaksakan penanaman komoditas ekspor di lahan yang seharusnya untuk tanaman pangan, atau menggunakan kekerasan dalam proses pengumpulan hasil bumi. Dengan demikian, kedua kebijakan ini tidak hanya mengeksploitasi rakyat secara ekonomi, tetapi juga mengubah struktur kekuasaan tradisional dengan menjadikan bupati sebagai alat penindasan kolonial. Sistem ini berjalan efektif karena menciptakan rantai komando yang memaksa semua level masyarakat tunduk pada kepentingan pemerintah kolonial.

Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib yang dijalankan Daendels dirancang sebagai sebuah mesin eksploitasi yang saling melengkapi. Sistem Kontingen, dengan mengambil hasil bumi seperti beras dan jagung, secara langsung merampas kebutuhan pokok rakyat untuk konsumsi sehari-hari. Sementara itu, Sistem Penyerahan Wajib yang memaksa penjualan komoditas ekspor dengan harga murah, menghancurkan kemampuan ekonomi petani untuk menghasilkan keuntungan. Sejarawan van Niel (2005) dalam *"Java under the Cultivation System"* menjelaskan bahwa kombinasi ini sangat efektif untuk menguras surplus ekonomi. "Dengan dua kebijakan ini, pemerintah kolonial tidak hanya menguasai komoditas ekspor, tetapi juga mengontrol pasokan pangan dalam negeri, sehingga rakyat sepenuhnya bergantung dan tidak memiliki daya tawar" (van Niel, 2005, hlm. 34). Akibatnya, petani terjepit di antara kewajiban untuk memberi makan negara kolonial dan kewajiban untuk menjual hasil terbaiknya dengan harga yang tidak adil. Strategi Daendels untuk

memanfaatkan para bupati bukanlah kebetulan, melainkan sebuah langkah politik yang cerdas sekaligus kejam. Sebelumnya, para bupati memiliki otonomi dan kedudukan yang lebih independen. Daendels dengan sengaja merombak struktur kekuasaan tradisional ini dengan mengintegrasikan mereka secara paksa ke dalam birokrasi kolonial. Sejarawan Sutherland (2007) dalam "The Making of a Bureaucratic Elite" mencatat bahwa Daendels secara sistematis mengubah peran bupati dari penguasa tradisional menjadi pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas target pemerasan. "Dengan ancaman pemberhentian dan sanksi, para bupati diubah dari mitra yang setara menjadi bawahan yang patuh. Kesetiaan mereka dialihkan dari rakyatnya sendiri kepada Gubernur Jenderal di Batavia" (Sutherland, 2007, hlm. 22). Tekanan disiplin ketat yang disebutkan oleh Carey inilah yang memaksa para bupati memeraskannya sendiri, sehingga konflik horisontal antara elite lokal dan rakyat jelata pun tak terhindarkan.

Kekerasan dalam pelaksanaan sistem ini, baik melalui pemaksaan tanam maupun pengumpulan paksa, pada dasarnya adalah produk dari tekanan militer yang mendesak. Konteks "kebutuhan mendesak" yang dikemukakan Boomgaard diterjemahkan menjadi kuota yang tidak realistis, yang mustahil dipenuhi tanpa menggunakan kekerasan. Sejarawan Ricklefs (2008) dalam "Sejarah Indonesia Modern 1200–2008" menegaskan bahwa ambisi militer Daendelslah yang menjadi pendorong utamanya. "Jalan Raya Pos, benteng-benteng baru, dan tentara yang besar membutuhkan dana yang sangat besar dan cepat. Bagi Daendels, kekerasan terhadap petani Jawa dan tekanan kepada bupati adalah harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan koloni dari cengkeraman Inggris" (Ricklefs, 2008, hlm. 193). Dengan demikian, kekejaman sistem ini bukanlah sekadar efek samping, melainkan sebuah fitur yang disengaja dan diperlukan untuk memenuhi tujuan imperial Prancis dalam waktu yang singkat.

Bagian 3: Analisis Sebagai Bentuk Pemiskinan Sistematis **Pengurasan Surplus Ekonomi Rakyat Jawa**

Kebijakan Daendels mengenai Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib pada hakikatnya merupakan bentuk pengurasan surplus ekonomi secara sistematis terhadap rakyat Jawa. Melalui Sistem Kontingen, pemerintah kolonial mengambil langsung sebagian hasil bumi petani seperti beras dan ternak tanpa memberikan kompensasi yang layak. Sementara melalui Sistem Penyerahan Wajib, petani dipaksa menjual komoditas ekspor seperti kopi dan gula dengan harga yang jauh di bawah nilai pasarnya. Menurut van Niel (2005), praktik ini tidak hanya mengambil keuntungan yang seharusnya menjadi hak petani, tetapi seringkali bahkan mengambil bagian dari hasil produksi yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar keluarga. Petani kehilangan kemampuan untuk menabung atau mengembangkan usaha mereka, sehingga terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Boomgaard (1989) menjelaskan bahwa pengambilan surplus ini dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan dipaksakan. Pemerintah kolonial menetapkan kuota yang harus dipenuhi setiap daerah tanpa mempertimbangkan kondisi nyata pertanian setempat. Akibatnya, petani tidak hanya kehilangan hasil surplus, tetapi seringkali harus menyerahkan sebagian dari hasil panen yang sebenarnya dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi keluarga. Dengan demikian, kedua kebijakan ini berfungsi sebagai mesin pemindahan kekayaan dari pedesaan Jawa ke kas pemerintah kolonial. Praktik yang terlihat sebagai kebijakan fiskal biasa ini pada kenyataannya merupakan bentuk pemiskinan terstruktur yang melemahkan dasar-dasar ekonomi rakyat Jawa untuk jangka panjang.

Beban Ganda yang Ditanggung Rakyat Jawa

Selain mengalami pengurasan surplus ekonomi, rakyat Jawa juga harus menanggung beban ganda yang semakin memperdalam jurang pemiskinan. Di satu sisi, mereka kehilangan

hasil panen melalui Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib. Di sisi lain, mereka dipaksa untuk melakukan kerja rodi dalam berbagai proyek pemerintah kolonial, terutama pembangunan Jalan Raya Pos Anyer- Panarukan. Menurut Ricklefs (2008), kerja rodi ini menimbulkan dampak yang sangat berat karena dilaksanakan bersamaan dengan kewajiban menyerahkan hasil bumi. Petani tidak hanya kehilangan sumber penghidupan dari hasil pertanian, tetapi juga kehilangan tenaga dan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk menggarap lahannya sendiri. Boomgaard (1989) mencatat bahwa banyak petani yang terpaksa mengabaikan lahannya karena harus memenuhi kewajiban kerja rodi, yang pada akhirnya berujung pada gagal panen dan kelaparan.

Beban ganda ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Hasil panen yang berkurang karena kurangnya perawatan, ditambah dengan kewajiban menyerahkan sebagian hasil bumi, membuat petani semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Van Niel (2005) menyebutkan bahwa kombinasi antara eksploitasi ekonomi melalui penyerahan hasil bumi dan eksploitasi tenaga melalui kerja rodi ini merupakan strategi sistematis pemerintah kolonial untuk memaksimalkan pengurusan sumber daya Jawa dengan biaya serendah-rendahnya. Dengan demikian, beban ganda yang ditanggung rakyat Jawa tidak hanya mempercepat proses pemiskinan, tetapi juga menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk memulihkan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk.

Dampak pada Ketahanan Pangan dan Munculnya Kelaparan

Kebijakan Daendels memberikan dampak buruk yang langsung terasa pada ketahanan pangan rakyat Jawa. Alih fungsi lahan pertanian pangan untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu, ditambah dengan kewajiban menyerahkan beras melalui Sistem Kontingen, mengakibatkan krisis pangan di berbagai daerah. Seperti dicatat oleh Carey (2007), pada periode 1808-1811 beberapa wilayah di Jawa mengalami kelaparan yang dipicu oleh berkurangnya produksi beras dan penyerahan paksa hasil panen kepada pemerintah kolonial. Boomgaard (1989) menjelaskan bahwa tekanan untuk memenuhi kuota komoditas ekspor menyebabkan banyak petani mengalihkan lahan sawah mereka menjadi perkebunan. Akibatnya, produksi beras—yang merupakan makanan pokok masyarakat—menurun drastis. Situasi ini diperparah oleh kewajiban menyerahkan sebagian hasil panen yang masih tersisa melalui Sistem Kontingen, sehingga petani hanya menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali untuk konsumsi keluarga mereka sendiri. Dampak dari kebijakan ini terlihat jelas dalam laporan-laporan kolonial yang mencatat munculnya wabah kelaparan di daerah-daerah seperti Demak, Grobogan, dan Pati. Menurut van Niel (2005), krisis pangan ini bukanlah fenomena alam yang tak terelakkan, melainkan akibat langsung dari kebijakan ekonomi Daendels yang mengabaikan kebutuhan dasar rakyat Jawa. Dengan demikian, sistem yang diterapkan Daendels tidak hanya memiskinkan rakyat secara ekonomi, tetapi juga membahayakan ketahanan pangan dan kelangsungan hidup mereka.

Tujuan Kolonial: Pembiayaan Militer untuk Kepentingan Prancis

Kebijakan ekonomi Daendels pada hakikatnya ditujukan untuk mendanai kepentingan militer Prancis dalam menghadapi ancaman Inggris. Dana yang dihasilkan dari Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib dialokasikan terutama untuk pembiayaan tentara, pembangunan benteng pertahanan, dan proyek infrastruktur militer seperti Jalan Raya Pos. Seperti dikemukakan oleh Ricklefs (2008), kebijakan-kebijakan Daendels secara keseluruhan diarahkan untuk "mengubah Jawa menjadi benteng yang mampu menahan serangan Inggris." Van Niel (2005) menegaskan bahwa seluruh mekanisme eksploitasi ini dirancang untuk mengisi kas pemerintah kolonial yang kosong, dengan prioritas utama pada pembiayaan pertahanan. Dalam laporannya kepada pemerintah Prancis, Daendels sendiri menyatakan

bahwa tujuan utama kebijakannya adalah "menyelamatkan Jawa dari ancaman Inggris" melalui penguatan militer yang didanai oleh sumber daya lokal. Yang patut dicatat, seperti dikritik oleh Boomgaard (1989), tidak ada bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari eksploitasi ini yang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa. Seluruh surplus ekonomi yang berhasil dikumpulkan dialirkan untuk kepentingan pertahanan kolonial, sementara rakyat Jawa justru semakin terpuruk akibat kebijakan tersebut. Fakta ini memperkuat tesis bahwa kebijakan Daendels merupakan bentuk pemiskinan sistematis yang sengaja dilakukan untuk membiayai kepentingan kolonial semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa (1808-1811), dapat disimpulkan bahwa kebijakan Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib merupakan instrumen pemiskinan sistematis yang dirancang secara terstruktur. Kedua kebijakan ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk langsung dari konflik geopolitik Eropa dimana Jawa menjadi pion dalam pertarungan antara Prancis dan Inggris. Daendels menerapkan sistem eksploitasi ganda yang efektif melalui mekanisme yang saling memperkuat. Sistem Kontingen merampas kebutuhan pokok rakyat, sementara Sistem Penyerahan Wajib menghancurkan basis ekonomi petani dengan memaksa mereka menjual hasil bumi dengan harga murah. Yang paling strategis, Daendels berhasil menciptakan rantai komando yang efisien dengan mengkooptasi elite lokal - para bupati - dan mengubah mereka dari penguasa tradisional menjadi alat penindasan kolonial melalui sistem disiplin dan sanksi yang ketat. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional dan saling terkait. Pengurusan surplus ekonomi secara paksa disertai dengan beban kerja rodi menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Alih fungsi lahan dan perampasan hasil panen melalui Sistem Kontingen mengakibatkan krisis ketahanan pangan dan kelaparan di berbagai wilayah. Yang paling mendasar, seluruh hasil eksploitasi ini dialokasikan secara eksklusif untuk kepentingan militer Prancis tanpa sedikitpun memperhatikan kesejahteraan rakyat Jawa. Dengan demikian, periode Daendels menandai transformasi fundamental dari model penjajahan kongsi dagang VOC menuju negara kolonial yang terpusat, militeristik, dan eksploitatif. Warisan kelam ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kekuasaan kolonial dapat merancang sistem pemerintahan yang secara sistematis memiskinkan penduduk lokal demi membiayai kepentingan imperial, sekaligus menjadi refleksi historis tentang dampak penjajahan terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang berdampak hingga jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Boomgaard, P. (1989). *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880*. CASA.
- Bosma, U. (2021). *The making of a periphery: How island Southeast Asia became a mass exporter of tropical commodities*. Columbia University Press.
- Bosma, U., & Raben, R. (2008). *Being "Dutch" in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500-1920*. NUS Press.
- Carey, P. (2007). *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855*. KITLV Press.
- Connelly, O. (2006). *The wars of the French Revolution and Napoleon, 1792-1815*. Routledge.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Gramedia.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan.



- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Terjemahan). Penerbit Serambi.
- Sutherland, H. (2007). *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*. Equinox Publishing.
- Van Niel, R. (2005). *Java under the Cultivation System: Collected Writings*. KITLV Press.
- Van Niel, R. (2005). *Java's Economic Cycle: Seventeenth to Early Twentieth Centuries*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 36(1), 45-62.
- Ward, K. (2009). *Networks of Empire: Forced Migration in the Dutch East India Company*. Cambridge University Press.